



REPUBLIK
INDONESIA

KONSEP DAN TEKNIS PELAKSANAAN KORTEK RENBANG TAHUN 2018

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Jakarta, 7-9 Februari 2018



TUJUAN DAN PELUASAN CAKUPAN SUBSTANSI KORTEK TAHUN 2018

DASAR HUKUM

Pasal 258 Ayat 3 & Pasal 259 UU Nomor 23 Tahun 2014

SINKRONISASI DAN HARMONISASI PEMBANGUNAN

Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melakukan **sinkronisasi dan harmonisasi** dengan Daerah untuk **mencapai target pembangunan nasional**.



DILAKUKAN DALAM BENTUK KOORDINASI TEKNIK

Untuk **mencapai target pembangunan nasional** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (3) dilakukan **koordinasi teknis pembangunan** antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah.

PASAL 259 AYAT 1

KOORDINASI KORTEK

ANTARA K/L DAN PEMDA PROVINSI DIKOORDINASIKAN OLEH MENDAGRI DAN MENPPN

Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

PASAL 259 AYAT 2

ANTARA PROVINSI DAN KAB/KOTA DIKOORDINASIKAN OLEH GUBERNUR

Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

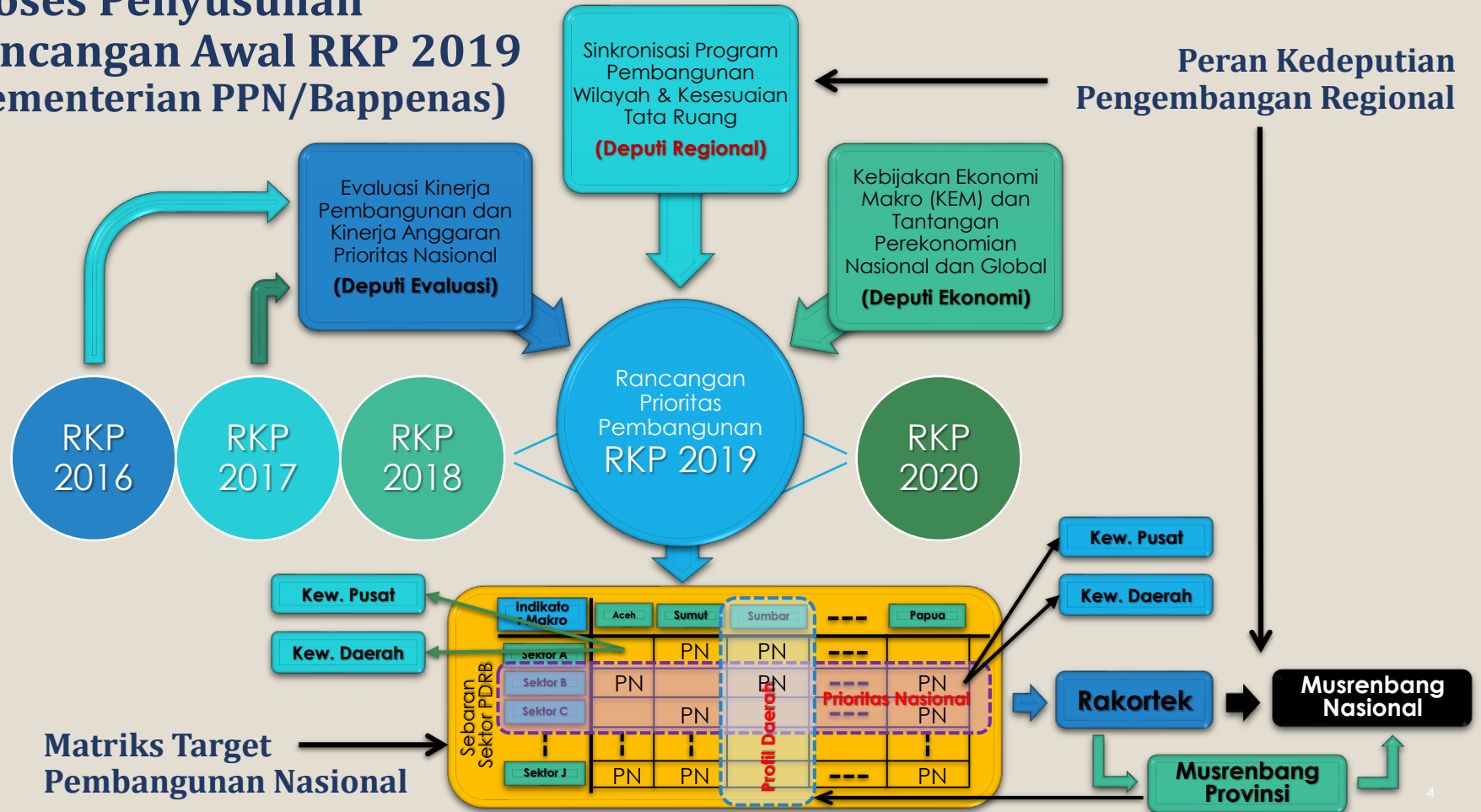
PASAL 259 AYAT 3

JENIS-JENIS KORTEK

Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap **perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah**.

PASAL 259 AYAT 4

Proses Penyusunan Rancangan Awal RKP 2019 (Kementerian PPN/Bappenas)



PENYELARASAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL





PERLUASAN MEKANISME KORTEK TAHUN 2018

Pra-Rakortek:

1. **Pra-Rakortek Konsolidasi Kementerian/Lembaga (K/L);**
2. **Pra-Rakortek Teknis** Per-Urusan, Per-Bidang atau Per K/L:
 - **Pemetaan Prioritas Nasional** → Sasaran, Indikator, Target (PN – PP – KP – ProPN);
 - **Pemetaan Prioritas Bidang** → Sasaran, Indikator, Target (RPJMN – RKP – DIBAHAS);
 - **Penyepakatan Pembagian Desk** → Jumlah, Penanggungjawab Desk dan Pembagian Waktu;
 - **Kriteria Penetapan/Tagging/Flagging Dukungan Proyek Daerah** → Mekanisme dan Penilaian;
3. **Pra-Rakortek Konsolidasi Pemerintah Daerah;**

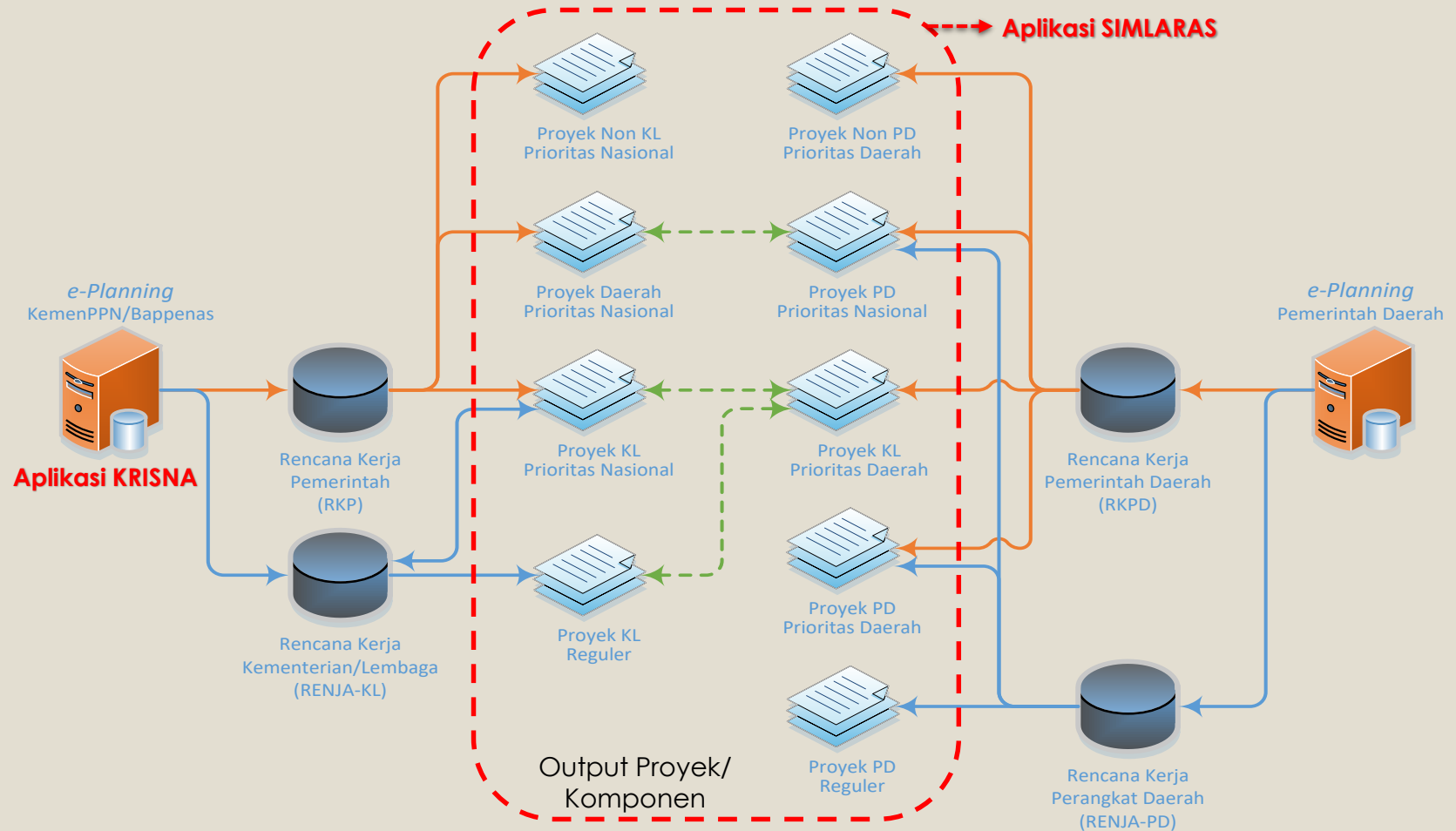
Penyampaian Usulan Proyek/Kegiatan/Output:

1. **Updating Rancangan Awal Renja K/L** (Format 1A & 4A) → K/L melakukan Tagging Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang pada **"APLIKASI KRISNA"**;
2. **Pengusulan Output/Proyek K/L** (Format 1B & 4B) → Pemda mengusulkan bahan masukan (output/proyek kewenangan pusat) kepada K/L pada **"APLIKASI SIMLARAS"**;
3. **Penyampaian Kegiatan/Proyek OPD** (Format 2, 3, 5 & 6) → Pemda mengusulkan kegiatan/proyek kewenangan daerah yang dibiayai oleh APBD yang dianggap mendukung pencapaian Prioritas Nasional pada **"APLIKASI SIMLARAS"**;

AGENDA RAKORTEK TAHUN 2018:

1. **PRA-RAKORTEK**
2. **PENYAMPAIAN
USULAN**
3. **DISKUSI ONLINE**
4. **RAKORTEK**
5. **PASKA-RAKORTEK**

PENYELARASAN PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH



I. Daftar Proyek K/L Pendukung Prioritas Nasional (Sumber Dana APBN)

	No	Pelaksana Proyek	Input	Sumber Dana	Kewenangan			Prioritas		Pembahasan				Editor	Verifikator
					Pusat	Daerah	Swasta	PN	PD	Rakortek	Musrenbang	Forum DAK	Diskusi Online		
F 01	1	K/L	Bappenas K/L	APBN	√	-	-	√	-	√	√	-	√	Dit. Mitra K/L Bappenas	Dit. Pengngjwb PN

II. Daftar Proyek Daerah Pendukung Prioritas Nasional (Sumber Dana APBD)

	No	Pelaksana Proyek	Input	Sumber Dana	Kewenangan			Prioritas		Pembahasan				Editor	Verifikator
					Pusat	Daerah	Swasta	PN	PD	Rakortek	Musrenbang	Forum DAK	Diskusi Online		
F 03	1	SKPD	Pemda	APBD	-	√	-	√	√/-	√	√	-	√	Bappeda Prov	Dit. Pengngjwb PN

III. Daftar Proyek Non K/L Pendukung Prioritas Nasional (Sumber Dana KPBU, PINA, Subsidi)

No	Pelaksana Proyek	Input	Sumber Dana	Kewenangan			Prioritas		Pembahasan				Editor	Verifikator
				Pusat	Daerah	Swasta	PN	PD	Rakortek	Musrenbang	Forum DAK	Diskusi Online		
F 05	1	Swasta/ BUMN	Bappenas	KPBU PINA Subsidi	√/-	-	√	-	√	√	-	√	Dit. Mitra K/L Bappenas	Dit. Pengngjwb PN
	2	Swasta/ BUMN/ BUMD	Pemda	KPBU PINA Subsidi	-	√/-	√	-	√	√	-	√	Dit. Mitra K/L Bappenas	Dit. Pengngjwb PN

IV. Daftar Usulan Proyek Prioritas Daerah

	No	Pelaksana Proyek	Input	Sumber Dana	Kewenangan			Prioritas		Pembahasan				Editor	Verifikator
					Pusat	Daerah	Swasta	PN	PD	Rakortek	Musrenbang	Forum DAK	Diskusi Online		
F 02	1	K/L	Pemda	APBN	√	-	-	√	-	√	√	-	√	Dit. Mitra K/L Bappenas	Dit. Pengngjwb PN
F 04	2	SKPD	Pemda	APBN	-	√	-	√	-	-	√/-	√*)	√	Dit. Mitra K/L Bappenas	Dit. Pengngjwb PN
angan : DAK	3	K/L	Pemda	APBN	√	-	-	-	√	√	-	-	√	Dit. Mitra K/L Bappenas	Dit. Pengngjwb PN
enugasan/ DAK Afirmasi DAK Regular	4	SKPD	Pemda	APBN	-	√	-	-	√	-	-	√**)	√	Dit. Mitra K/L Bappenas	Dit. Pengngjwb PN

Keterangan :
 *) DAK
 Penugasan/
 DAK Afiriasi
 **) DAK Regular

Diskusi ONLINE:

1. Pembagian Waktu Diskusi;
2. Penentu/Pengambil Keputusan Hasil Diskusi Online;
3. Bentuk Kesepakatan Hasil Diskusi (Tagging/Flagging);

Rakortek:

1. Format Form-Form Rakortek (Format 1 sampai dengan Format 6) → Urutan Prioritas Pembahasan;
2. Pembagian Waktu Pembahasan;
3. Berita Acara Kesepakatan Hasil Rakortek;
4. Catatan Tindak Lanjut Hasil Rakortek;

Paska-Rakortek:

1. Paska-Rakortek Konsolidasi Kementerian/Lembaga (K/L);
2. Paska-Rakortek Konsolidasi Pemerintah Daerah;

AGENDA RAKORTEK TAHUN 2018:

- 1. PRA-RAKORTEK**
- 2. PENYAMPAIAN
USULAN**
- 3. DISKUSI ONLINE**
- 4. RAKORTEK**
- 5. PASKA-RAKORTEK**

Informasi Type/Kategori Daftar Proyek
Kategori I

Lihat Hasil Rakortek *Form Catatan Hasil Verifikasi*

Hasil Skoring Verifikasi Rakortek : 19

Catatan Klarifikasi

1. Aspek Kewenangan : Kewenangan Pusat
2. Aspek Lokasi : Akan disesuaikan dengan RTRW dan Perpres Jabodetabek
3. Lain-lain : Project ini merupakan project persiapan pelaksanaan

Lihat Hasil Verifikasi Daerah

Hasil Skoring Verifikasi Daerah : 24

Catatan Klarifikasi

1. Aspek Kewenangan : KEWENANGAN PUSAT
2. Aspek Lokasi :
3. Lain-lain :

Tombol Untuk Akses Merubah Data
Proyek
Hanya diberikan Khusus pada User
tertentu

Diskusi *Form Diskusi Online*

Komentar Daerah	Komentar KL	Komentar Bangda	Komentar Bappenas
Mohon revisi lokasi ke Kabupaten Kepulauan Aru			

Simpan Close

e-Planning **Home** **Pembahasan** **M. Nur Syamsi Ruzal**

KATEGORI I. DAFTAR PROYEK K/L PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (Sumber Dana APBN) Preview

DAFTAR PROYEK K/L PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (Sumber Dana APBN)

Pilih Provinsi *optional

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pilih

No	PN - PP - KP	Proyek Prioritas Nasional	Proyek KL	Program KL - Kegiatan KL	Lokasi	Satuan	Usulan		Hasil Kesepakatan		Aksi
							Target	Pagu (Juta Rupiah)	Target	Pagu (Juta Rupiah)	
1	PN : Pembangunan wilayah	Penyediaan Akses Telekomunikasi	Pembangunan Jaringan Internet di Kawasan Perbatasan Negara Kabupaten Belu	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika - Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyaliran	Kab. Belu	Unit	2017 : 0.00 2018 : 36.00 2019 : 0.00 2020 : 0.00 2021 : 0.00	2017 : 0.00 2018 : 5,760.00 2019 : 0.00 2020 : 0.00 2021 : 0.00	36.00	5,760.00	Catatan Ubah
2	PN : Pembangunan wilayah	Penyediaan Akses Telekomunikasi	Pembangunan Jaringan Internet di Kawasan Perbatasan Negara Kabupaten Alor	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika - Penyediaan Infrastruktur dan Layanan	Kab. Alor	Unit	2017 : 0.00 2018 : 44.00 2019 : 0.00 2020 : 0.00 2021 : 0.00	2017 : 0.00 2018 : 24,640.00 2019 : 0.00 2020 : 0.00 2021 : 0.00	44.00	24,640.00	Catatan Diskusi

Informasi Daftar Proyek

Pilih Provinsi
untuk menyaring
Daftar Proyek

Informasi
Verifikasi:

- ✓ : Bappeda Prov
- ✓ : Rakortek

FORMAT 1 PROGRAM/KEGIATAN K/L YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

Data Rencana Awal Renja KL (APBN)
(Aplikasi KRISNA)

K/L:

A) INDIKASI RANCANGAN AWAL RENJA K/L

No.	PRIORITAS NASIONAL, PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	OUTPUT (PROYEK) K/L	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	TARGET*	LOKASI		KET
							PROVINSI	KAB/KOTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
.. Dst									

B) USULAN DAERAH UNTUK RANCANGAN AWAL RENJA K/L

No.	PRIORITAS NASIONAL, PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	USULAN OUTPUT (PROYEK) K/L	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	USULAN TARGET*	USULAN LOKASI		KET
							PROVINSI	KAB/KOTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
.. Dst									

Referensi PN, PP, KP, ProPN
(Aplikasi KRISNA)

Data Usulan Daerah ke K/L – Kewenangan Pusat
(Aplikasi SIMLARAS)

FORMAT 2 PROGRAM/KEGIATAN PROVINSI YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

PROVINSI:

URUSAN :

No.	PRIORITAS NASIONAL, PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN (PROYEK) DAERAH	PROGRAM DAERAH	PERANGKAT DAERAH	OUTPUT/TARGET	PAGU (APBD) (RUPIAH)	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
.. Dst									



**Referensi PN, PP, KP, ProPN
(Aplikasi KRISNA)**



**Data Program/Kegiatan Daerah (Kewenangan Provinsi - APBD)
(Aplikasi SIMLARAS)**

FORMAT 3 PROGRAM/KEGIATAN KABUPATEN/KOTA YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :

URUSAN :

No.	PRIORITAS NASIONAL, PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN (PROYEK) DAERAH	PROGRAM DAERAH	PERANGKAT DAERAH	OUTPUT/TARGE T	PAGU (APBD) (RUPIAH)	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1							4		
2									
.. Dst									



**Referensi PN, PP, KP, ProPN
(Aplikasi KRISNA)**



**Data Program/Kegiatan Daerah (Kewenangan Kab/Kota - APBD)
(Aplikasi SIMLARAS)**

FORMAT 4 PENYELARASAN PROYEK K/L YANG MENDUKUNG TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL (DILUAR PRIORITAS NASIONAL)

URUSAN:

K/L:

Data Rencana Awal Renja KL (APBN)
(Aplikasi KRISNA)

A) INDIKASI RANCANGAN AWAL RENJA K/L

NO	TARGET NASIONAL (SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2015-2019)		OUTPUT (PROYEK) K/L	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	TARGET*	LOKASI		KET
	Indikator RPJMN	Target 2019					PROVINSI	KAB/KOTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
.. Dst									

B) USULAN DAERAH UNTUK RANCANGAN AWAL RENJA K/L

NO	TARGET NASIONAL (SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2015-2019)		USULAN OUTPUT (PROYEK) K/L	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	USULAN TARGET*	USULAN LOKASI		KET
	Indikator RPJMN	Target 2019					PROVINSI	KAB/KOTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
.. Dst									

Referensi Target Pembangunan Nasional RPJMN
(Aplikasi SIMLARAS)

Data Usulan Daerah ke K/L – Kewenangan Pusat
(Aplikasi SIMLARAS)

FORMAT 5 PENYELARASAN PROGRAM/KEGIATAN PROVINSI YANG MENDUKUNG TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL (DILUAR PRIORITAS NASIONAL)

PROVINSI:

URUSAN/BIDANG:

NO	TARGET NASIONAL (SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2015-2019)		KEGIATAN (PROYEK) DAERAH	PROGRAM DAERAH	PERANGKAT DAERAH	OUTPUT/ TARGET	PAGU (APBD) (RUPIAH)	LOKASI	KETERANGAN
	Indikator RPJMN	Target 2019							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
.. Dst									



**Referensi Target Pembangunan Nasional RPJMN
(Aplikasi SIMLARAS)**



**Data Program/Kegiatan Daerah (Kewenangan Provinsi - APBD)
(Aplikasi SIMLARAS)**

FORMAT 6 PENYELARASAN PROGRAM/KEGIATAN KABUPATEN/KOTA YANG MENDUKUNG TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL (DILUAR PRIORITAS NASIONAL)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

URUSAN/BIDANG:

NO	TARGET NASIONAL (SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2015-2019)		KEGIATAN (PROYEK) DAERAH	PROGRAM DAERAH	PERANGKAT DAERAH	OUTPUT/ TARGET	PAGU (APBD) (RUPIAH)	LOKASI	KETERANGAN
	Indikator RPJMN	Target 2019							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1						4			
2									
Dst									

**Referensi Target Pembangunan
Nasional RPJMN
(Aplikasi SIMLARAS)**

**Data Program/Kegiatan Daerah (Kewenangan Kab/Kota - APBD)
(Aplikasi SIMLARAS)**



REPUBLIK INDONESIA

Timeline Agenda **RAKORTEK 2018**



Rapim Penentuan Konsep
Rakortek **M4 Januari**

Pra-Rakortek Konsolidasi K/L
20 Januari 2018



Pra-Rakortek Teknis Per-
urusan **29 Jan – 9 Feb 2018**

Pra-Rakortek Sosialisasi ke
Daerah **7 – 9 Februari 2018**



Penginputan Usulan oleh
Daerah **12 – 19 Februari 2018**



Forum Rakortek
M4 Februari – M1 Maret



Diskusi Online
20 Feb - Selesai



Penginputan/Update Usulan
oleh K/L **12 – 14 Februari 2018**



REPUBLIK INDONESIA

Timeline Agenda **RAKORTEK** Kedepan (Rancangan Permendagri)

